

# **BAB I**

## **PENDAHULIAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah membawa perubahan yang fundamental dalam hubungan tata pemerintahan dan hubungan keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya masalah anggaran (Darise,2008). Diberlakukan dan dikeluarkannya perundang-undangan dan produk hukum ini dalam upaya untuk menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Mengingat kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah daerah yang sangat tergantung pada kemampuan aparatur pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Untuk menjalankan rencana atau mengembangkan kebesaran tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas, efisiensi, dan efektifitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan, alat

bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang, ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas diberbagai unit kerja.

Menurut Mardiasmo (2009 : 61) Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standard Akuntansi Pemerintah. Secara operasional, Menteri Dalam Negeri telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Kepmendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan transparansi laporan keuangan.

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (Depdagri) melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang sekarang diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri (PerMendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan implikasi yang cukup bermakna bagi pemerintah daerah terutama dalam hal proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk provinsi maupun Kabupaten dan Kota.

Bone Bolango tahun 2011-2015 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010 yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, berikut ini tabel Laporan Realisasi Anggaran Belanja.

**Tabel 1**  
**Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2010**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Persentase (%)
	<b>Belanja tidak langsung</b>			
1	Belanja Pegawai	172.708.354.664,00	171.270.448.282,00	99,16
2	Belanja Hibah	9.766.037.741,00	9.387.737.741,00	96,12
3	Belanja Bantuan Sosial	8.594.935.000,00	7.915.107.732,00	92,02
4	Belanja Bantuan keu,	8.450.400.000,00	8.365.550.000,00	100
5	Belanja tidak terduga	1.293.391.500,00	1.293.391.500,00	100
	<b>Jumlah</b>	<b>200.813.118.905,00</b>	<b>198.232.235.255,00</b>	<b>98.71</b>
	<b>Belanja langsung</b>			
1	Belanja pegawai	20.875.551.745,00	19.232.176.347,00	92,12
2	Belanja barang dan jasa	51.589.506.374,00	49.756.074.560,00	96,44
3	Belanja Modal	75.496.825.072,00	55.544.915.421,00	73,57
	<b>Jumlah</b>	<b>147.961.883.191,00</b>	<b>124.533.166.328,00</b>	<b>84.16</b>
	<b>Jumlah belanja</b>	<b>348.775.002.096,00</b>	<b>322.765.401.583,00</b>	<b>92.54</b>

Tabel 2

## Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2011

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Persentase (%)
	<b>Belanja tidak langsung</b>			
1	Belanja Pegawai	209.515.419.925,00	203.319.766.917,00	97.74
2	Belanja Hibah	11.864.125.000,00	11.540.000.000,00	97.26
3	Belanja Bantuan Sosial	5.782.500.000, 00	5.719.732.750,00	98.21
4	Belanja Bantuan keu,	9.882.000.000,00	9.766.369.506,00 9	98.92
5	Belanja Tidak Terduga	530.520.000,00	325.953.175,00	61.44
	<b>Jumlah</b>	<b>237.574.564.925,00</b>	<b>230.671.822.348,00</b>	<b>97.09</b>
	<b>Belanja langsung</b>			
1	Belanja pegawai	21.476.877.277,00	21.156.254.647,00	98.5
2	Belanja barang dan jasa	68.626.254.283,00	67.708.823.353,00	98.66
3	Belanja Modal	123.531.688.594,61	92.104.747.963,00	74.55
	<b>Jumlah</b>	<b>213.634.820.154,61</b>	<b>180.969.825.963,00</b>	<b>98.70</b>
	<b>Jumlah belanja</b>	<b>451.209.385.079,61</b>	<b>411.641.648.311,00</b>	<b>91.23</b>

Tabel 3

## Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2012

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Persentase (%)
	<b>Belanja tidak langsung</b>			
1	Belanja Pegawai	243.314.273.766,12	240.029.485.436,00	98.64
2	Belanja Hibah	6.238.900.000,00	5.904.990.000,00	94.64
3	Belanja Bantuan Sosial	5.145.904.000,00	4.670.374.000,00	90.75
4	Belanja Bantuan keu,	14.707.300.000,00	14.455.959.746,00	98.29
5	Belanja Tidak Terduga	688.020.000,00	286.098.500,00	41.58
	<b>Jumlah</b>	<b>270.094.397.766,12</b>	<b>265.346.907.682,00</b>	<b>98.24</b>
	<b>Belanja langsung</b>			
1	Belanja pegawai	24.977.835.258,12	27.386.613.060,00	109
2	Belanja barang dan jasa	71.045.651.513,07	71.590.113.202,00	100
3	Belanja Modal	116.051.065.817,96	88.616.280.221,00	76.35
	<b>Jumlah</b>	<b>212.074.552.589,15</b>	<b>187.593.006.438,00</b>	<b>88.45</b>
	<b>Jumlah belanja</b>	<b>482.168.950.355,27</b>	<b>452.939.914.165,00</b>	<b>93.93</b>

Berdasarkan analisis Varians secara umum anggaran belanja Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2010 tidak sesuai dengan realisasi anggaran. Pada pos belanja tidak langsung memiliki anggaran sebesar Rp. 200.813.118.905,00 dan yang realisasi sebesar Rp.198.232.235.255,00. Dengan persentase realisasi 98,71% dan pada pos belanja langsung anggaran sebesar Rp.200.813.118.905,00 dan terealisasi sebesar Rp. 198.232.235.255,00 dengan persentase 84,16%.

Tahun 2011 pada pos belanja tidak langsung sebesar Rp. 237.574.564.925,00 dan yang terealisasi hanya sebesar Rp. 230.671.822.348,00 selisih dengan persentase 97,09% dan pada pos belanja langsung anggaran sebesar Rp.213.634.820.154,61 dan terealisasi sebesar Rp. 180.969.825.963,00 dengan persentase 98,70%.

Sedangkan pada tahun 2012 pos belanja tidak langsung sebesar Rp.270.094.397.766,12 dan yang terealisasi hanya sebesar Rp.265.346.907.682,00 dengan persentase 98,24% dan pada pos belanja langsung anggaran sebesar Rp.212.074.552.589,15 dan terealisasi sebesar Rp. 187.593.006.438,00 dengan persentase 88,45%.

Terjadinya selisih antara anggaran dan realisasi anggaran pada tahun 2010, 2011, 2012 dari kedua pos belanja di atas yang terbagi atas beberapa pos belanja yaitu di sebabkan oleh permasalahan yang timbul seperti ketidak konsistenan dengan berbagai perencanaan yang telah direncanakan dalam hal ini apa yang sudah menjadi rencana kerja tidak berjalan sesuai yang direncanakan, ketidak sesuaian belanja yang dianggarkan dengan harga yang dibutuhkan dalam hal ini pada pos belanja modal.

Mengacu kepada uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian yang berjudul “ Varians Anggaran Dan Realisasi Anggaran Belanja Pada

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango (studi kasus pada DPPKAD Kabupaten Bone Bolango) “.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terjadinya selisih dalam penyusunan anggaran dan realisasi anggaran belanja.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya selisih antara anggaran dan realisasi anggaran belanja.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah seberapa besar varians anggaran dan realisasi anggaran belanja pada Pemerintahan Daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bone Bolango.?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui varians anggaran dan realisasi anggaran belanja pada Pemerintahan Daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bone Bolango.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat teoritis**

1. Dapat memberikan pengetahuan dan meningkatkan wawasan mengenai anggaran dan realisasi anggaran belanja.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi sektor publik.
3. Dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi yang mengadakan penelitian berikutnya.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

1. Manfaat praktik pada pemerintah daerah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan kebijakan pemberdayaan aparatur di setiap SKPD.
2. Dapat sebagai Bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan yaitu pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam rangka menyempurnakan sistem penyesuaian rencana kerja anggaran di masing-masing SKPD.